

ABSTRAK

Eksistensi wacana pembangunan kota pintar yang dibingkai sebagai opsi tata kelola perkotaan yang baru, inovatif, berkelanjutan, dan progresif menghasilkan asumsi bahwa kota pintar ialah proyek pembangunan yang akan menguntungkan seluruh lapisan sosial tanpa terkecuali. Menolak pandangan yang terberi, skripsi ini memposisikan pembangunan kota pintar sebagai proyek politik dengan bertolak pada kasus ASEAN Smart Cities Network (ASCN) untuk menguak intensi ekonomi politik dalam wacana pembangunan kota pintar yang tengah digagas. Dengan menggunakan lensa kepengaturan (*governmentality*) dan analisis wacana kritis sebagai metode riset, skripsi ini berargumentasi bahwa inisiasi pembangunan kota pintar di ASEAN tersebut sejatinya merefleksikan strategi penguasaan untuk memandu negara-negara anggota ASEAN sekaligus kota-kota terpilih untuk mewajarkan dan menginternalisasikan wacana pembangunan neoliberal global. Praktik-praktik tersebut selanjutnya bergulir menjadi upaya rekonfigurasi tatanan politik regional yang kian mendelegasikan pemerintahan pada institusi internasional, reproduksi hubungan ketergantungan, dan peningkatan risiko kerentanan keamanan. Lebih dari itu, agenda ini juga melibatkan pengkondisian subjek sebagai subjek mandiri dan bertanggung jawab dalam mengaktualisasikan imajinasi kota pintar di kawasan. Temuan riset ini lantas berkontribusi pada penegasan bahwa transformasi model pembangunan menjadi pembangunan yang berasaskan pada nilai-nilai pembangunan neoliberal tidak terjadi secara organik, melainkan direayasa, dibentuk, dan dioperasikan secara kontinu oleh jejaring kekuasaan yang mendominasi produksi dan diseminasi pengetahuan.

Kata kunci: kepengaturan, *governmentality*, wacana pembangunan, neoliberalisme, kota pintar, ASEAN, ASCN, Asia Tenggara

ABSTRACT

The framing of smart city development discourse as a new, innovative, sustainable, and progressive urban governance alternative results in the presumption that smart city benefits everyone. Resisting such a given perspective, this thesis situates smart city development as a political project by using ASEAN Smart Cities Network (ASCN) as a case study to uncover and dissect its political economy intentions. Employing governmentality framework and critical discourse analysis as research methods, this thesis argues that the ASCN initiative reflects subjectivation strategies to shape the conducts of ASEAN member states as well as its selected pilot cities to normalize and internalize the neoliberal discourse of development as its rationale. Such practices then turned into efforts to reconfigure the regional political order which increasingly delegated governing power to international institution, reproduction of dependency, and increased risk of security vulnerability. Additionally, this smart city agenda also involves technology of control to condition the subjects to become autonomous and responsible subjects in realizing smart city vision in the region. Therefore, the findings of this research engage with the arguments that the neoliberal turn in development model was not an organic process, rather one that was deliberately engineered, shaped, and operationalized continuously through networks of power dominating the production and dissemination of knowledge.

Key words: governmentality, development discourse, neoliberalism, smart cities, ASEAN, ASCN, Southeast Asia